



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai

12

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Jumlah Desa adalah jumlah desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembagian ADD dan BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.

BAB II PENENTUAN BESARAN ADD DAN BHPRD

Pasal 3

ADD dan BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebanyak 60% (Enam Puluhan Perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD dan BHPRD yang dianggarkan kepada desa dan dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Balangan.

Pasal 5

Alokasi formula untuk ADD dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

12 3

Pasal 6

Alokasi formula untuk BHPRD dihitung berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah.

Pasal 7

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki desa

ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,60 \times Z1) + (0,40 \times Z2)] \times (BHPRDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = BHPRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten

Z2 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten

BHPRDkab = pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

- (3) Besaran ADD dan BHPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan Februari sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran 2017;
 - e. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - f. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD dan BHPRD Tahap I telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - d. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
- (5) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - c. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - d. fotokopi KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. Fotokopi NPWP atas nama Bendahara Desa;
 - f. berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang

Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan desa (ADD dan BHPRD Tahun 2017) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak;

- (6) Dalam hal sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa, laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung dari ADD dan BHPRD Tahap I ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yaitu :
 - a. fotokopy rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan desa (ADD dan BHPRD Tahap 1 Tahun 2018) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (8) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati c.q. DPMD dan BKD dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 9

Sistematika penyaluran ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :

- a. penyaluran ADD dan BHPRD disalurkan melalui rekening kas desa atas nama kepala desa dan bendahara desa pada bank yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- c. pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh tim pembina kecamatan.
- d. Camat membuat checklist hasil verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD.
- e. dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada DPMD dengan surat rekomendasi Camat.
- f. Kepala DPMD setelah meneliti pengajuan permohonan penyaluran tersebut, meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran.
- g. Kepala BKD menyalurkan ADD dan BHPRD langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan surat rekomendasi dari DPMD.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang tidak terduga.

- (3) Penjabaran program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan parameter kegiatan dan belanja desa yang ditetapkan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap kepada Bupati Cq. DPMD melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya atau laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Format laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan aplikasi siskeudes.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penundaan dan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD.
- (2) Ketentuan penundaan penyaluran dana ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPRD dalam hal:
 - 1) Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dan/atau Tahap II;
 - 2) terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dan/atau
 - 3) terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - b. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. dalam hal sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang

12

1

akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD dan BHPRD tahap I tidak dilakukan.

- d. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
 - e. dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran ADD dan BHPRD yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan BHPRD tahap II.
- (3) Ketentuan Penyaluran kembali dana ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :
- a. Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda dalam hal telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - b. dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dan/atau Tahap II berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dan BHPRD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
 - d. dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya telah ditetapkan, sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD.
 - e. Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan BHPRD yang ditunda penyalurannya selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Desa tahun anggaran berikutnya.
 - f. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD tahun sebelumnya yang menjadi sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum daerah dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran.
 - g. sisa ADD dan BHPRD tahun sebelumnya dianggarkan oleh Desa yang bersangkutan pada rekening pendapatan transfer.
 - h. dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.
- (4) Ketentuan Pemotongan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD dikarenakan terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%, masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% pada tahun anggaran berjalan.
- b. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada penyaluran ADD dan BHPRD tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ditemukan sisa dana ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30%, Kepala Desa wajib menyampaikan penjelasan mengenai sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tersebut kepada Bupati Cq. DPMD dengan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Sisa ADD dan BHPRD lebih dari 30% dihitung dari ADD dan BHPRD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPRD tersebut dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan serta upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan ADD dan BHPRD, dibentuk Tim pembina tingkat Kabupaten dan tim pembina tingkat kecamatan.
- (2) Tim pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat struktural dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat di Lingkungan kantor Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 15

- (1) Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme dan prosedur pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD;
 - b. merumuskan konsep pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD dan BHPRD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;

- c. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut penyelesaiannya;
 - d. melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi bersama dengan tim pembina tingkat kecamatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi :
- a. melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD dan BHPRD;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dan BHPRD;
 - c. mengumpulkan dan meneliti serta melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pencairan dan penyaluran ADD dan BHPRD beserta berkas persyaratan kelengkapannya;
 - d. meneliti dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban ADD dan BHPRD beserta berkas kelengkapannya;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan ADD dan BHPRD;
 - f. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan dan pengelolaan ADD dan BHPRD serta laporan realisasi penyerapan dana setiap tahap penyaluran ADD dan BHPRD; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan ADD dan BHPRD pada seluruh desa diwilayah kerjanya kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pengelolaan ADD dan BHPRD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Aparat pengawas fungsional daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap dana desa atas sepengetahuan Bupati.

12

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

A. BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA

NO.	KECAMATAN	DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp 564,493,000	Rp 282,246,500	Rp 282,246,500
2	JUAI	HAMARUNG	Rp 579,329,000	Rp 289,664,500	Rp 289,664,500
3	JUAI	JUAI	Rp 541,940,000	Rp 270,970,000	Rp 270,970,000
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp 670,309,000	Rp 335,154,500	Rp 335,154,500
5	JUAI	BATA	Rp 521,268,000	Rp 260,634,000	Rp 260,634,000
6	JUAI	GALUMBANG	Rp 553,976,000	Rp 276,988,000	Rp 276,988,000
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp 609,090,000	Rp 304,545,000	Rp 304,545,000
8	JUAI	SIRAP	Rp 533,678,000	Rp 266,839,000	Rp 266,839,000
9	JUAI	TIGARJUN	Rp 532,053,000	Rp 266,026,500	Rp 266,026,500
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp 671,929,000	Rp 335,964,500	Rp 335,964,500
11	JUAI	PAMURUS	Rp 551,437,000	Rp 275,718,500	Rp 275,718,500
12	JUAI	MARIAS	Rp 631,574,000	Rp 315,787,000	Rp 315,787,000
13	JUAI	LALAYAU	Rp 640,506,000	Rp 320,253,000	Rp 320,253,000
14	JUAI	MIHU	Rp 606,274,000	Rp 303,137,000	Rp 303,137,000
15	JUAI	HUKAI	Rp 582,838,000	Rp 291,419,000	Rp 291,419,000
16	JUAI	TAWAHAN	Rp 744,009,000	Rp 372,004,500	Rp 372,004,500
17	JUAI	GULINGGANG	Rp 618,728,000	Rp 309,364,000	Rp 309,364,000
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp 612,084,000	Rp 306,042,000	Rp 306,042,000
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp 530,597,000	Rp 265,298,500	Rp 265,298,500
20	JUAI	WONOREJO	Rp 632,399,000	Rp 316,199,500	Rp 316,199,500
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp 750,505,000	Rp 375,252,500	Rp 375,252,500
22	HALONG	HAUWAI	Rp 726,318,000	Rp 363,159,000	Rp 363,159,000
23	HALONG	BANGKAL	Rp 527,988,000	Rp 263,994,000	Rp 263,994,000
24	HALONG	MANTUYAN	Rp 690,585,000	Rp 345,292,500	Rp 345,292,500
25	HALONG	TABUAN	Rp 549,315,000	Rp 274,657,500	Rp 274,657,500
26	HALONG	HALONG	Rp 643,124,000	Rp 321,562,000	Rp 321,562,000
27	HALONG	PUYUN	Rp 511,468,000	Rp 255,734,000	Rp 255,734,000
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp 509,365,000	Rp 254,682,500	Rp 254,682,500
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp 542,053,000	Rp 271,026,500	Rp 271,026,500
30	HALONG	KAPUL	Rp 654,970,000	Rp 327,485,000	Rp 327,485,000
31	HALONG	MAMANTANG	Rp 648,398,000	Rp 324,199,000	Rp 324,199,000
32	HALONG	BINJAI PUNGAL	Rp 621,944,000	Rp 310,972,000	Rp 310,972,000
33	HALONG	LIYU	Rp 536,272,000	Rp 268,136,000	Rp 268,136,000
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp 1,005,697,000	Rp 502,848,500	Rp 502,848,500
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp 624,637,000	Rp 312,318,500	Rp 312,318,500
36	HALONG	BINJU	Rp 540,555,000	Rp 270,277,500	Rp 270,277,500
37	HALONG	KARYA	Rp 577,967,000	Rp 288,983,500	Rp 288,983,500
38	HALONG	UREN	Rp 627,598,000	Rp 313,799,000	Rp 313,799,000
39	HALONG	MARAJAI	Rp 787,001,000	Rp 393,500,500	Rp 393,500,500
40	HALONG	SURYATAMA	Rp 538,420,000	Rp 269,210,000	Rp 269,210,000
41	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp 685,259,000	Rp 342,629,500	Rp 342,629,500
42	HALONG	MAUYA	Rp 648,471,000	Rp 324,235,500	Rp 324,235,500
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp 671,721,000	Rp 335,860,500	Rp 335,860,500
44	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp 521,059,000	Rp 260,529,500	Rp 260,529,500
45	HALONG	MAMIGANG	Rp 677,696,000	Rp 338,848,000	Rp 338,848,000
46	AWAYAN	BIHARA	Rp 479,567,000	Rp 239,783,500	Rp 239,783,500
47	AWAYAN	PEMATANG	Rp 545,764,000	Rp 272,882,000	Rp 272,882,000
48	AWAYAN	MERAH	Rp 665,773,000	Rp 332,886,500	Rp 332,886,500
49	AWAYAN	AWAYAN	Rp 544,546,000	Rp 272,273,000	Rp 272,273,000
50	AWAYAN	PUDAK	Rp 487,280,000	Rp 243,640,000	Rp 243,640,000
51	AWAYAN	BADALUNGA	Rp 561,706,000	Rp 280,853,000	Rp 280,853,000
52	AWAYAN	TUNDAKAN	Rp 685,680,000	Rp 342,840,000	Rp 342,840,000
53	AWAYAN	SIKONTAN	Rp 484,840,000	Rp 242,420,000	Rp 242,420,000
54	AWAYAN	PULANTAN	Rp 496,417,000	Rp 248,208,500	Rp 248,208,500
55	AWAYAN	TUNDI	Rp 491,751,000	Rp 245,875,500	Rp 245,875,500
56	AWAYAN	MUARA JAYA	Rp 499,386,000	Rp 249,693,000	Rp 249,693,000
57	AWAYAN	BIHARA HILIR	Rp 487,436,000	Rp 243,718,000	Rp 243,718,000
58	AWAYAN	BARU	Rp 622,141,000	Rp 311,070,500	Rp 311,070,500
59	AWAYAN	AWAYAN HILIR	Rp 465,627,000	Rp 232,813,500	Rp 232,813,500
60	AWAYAN	PUTAT BASIUN	Rp 601,616,000	Rp 300,808,000	Rp 300,808,000
61	AWAYAN	SEI PUMPUNG	Rp 511,744,000	Rp 255,872,000	Rp 255,872,000
62	AWAYAN	BADALUNGA HILIR	Rp 559,014,000	Rp 279,507,000	Rp 279,507,000
63	AWAYAN	NUNGA	Rp 649,247,000	Rp 324,623,500	Rp 324,623,500
64	AWAYAN	TANGALIN	Rp 620,381,000	Rp 310,190,500	Rp 310,190,500
65	AWAYAN	KEDONDONG	Rp 480,768,000	Rp 240,384,000	Rp 240,384,000
66	AWAYAN	BARAMBAN	Rp 489,013,000	Rp 244,506,500	Rp 244,506,500
67	AWAYAN	AMBAKIANG	Rp 528,570,000	Rp 264,285,000	Rp 264,285,000
68	AWAYAN	PIYAIT	Rp 487,254,000	Rp 243,627,000	Rp 243,627,000
69	BATU MANDI	TARIWIN	Rp 512,364,000	Rp 256,182,000	Rp 256,182,000
70	BATU MANDI	LOK BATU	Rp 479,352,000	Rp 239,676,000	Rp 239,676,000
71	BATU MANDI	MUNJUNG	Rp 558,328,000	Rp 279,164,000	Rp 279,164,000
72	BATU MANDI	PELAJAU	Rp 547,271,000	Rp 273,635,500	Rp 273,635,500
73	BATU MANDI	BATUMANDI	Rp 552,692,000	Rp 276,346,000	Rp 276,346,000

NO.	KECAMATAN	DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II
74	BATU MANDI	RIWA	Rp 589,464,000	Rp 294,732,000	Rp 294,732,000
75	BATU MANDI	MANTIMIN	Rp 569,173,000	Rp 284,586,500	Rp 284,586,500
76	BATU MANDI	MAMPARI	Rp 612,463,000	Rp 306,231,500	Rp 306,231,500
77	BATU MANDI	BUNGUR	Rp 499,088,000	Rp 249,544,000	Rp 249,544,000
78	BATU MANDI	TELUK MESJID	Rp 545,319,000	Rp 272,659,500	Rp 272,659,500
79	BATU MANDI	TIMBUN TULANG	Rp 495,889,000	Rp 247,944,500	Rp 247,944,500
80	BATU MANDI	BANUA HANYAR	Rp 574,607,000	Rp 287,303,500	Rp 287,303,500
81	BATU MANDI	BAKUNG	Rp 550,774,000	Rp 275,387,000	Rp 275,387,000
82	BATU MANDI	KARUH	Rp 555,579,000	Rp 277,789,500	Rp 277,789,500
83	BATU MANDI	GUHA	Rp 538,304,000	Rp 269,152,000	Rp 269,152,000
84	BATU MANDI	GUNUNG MANAU	Rp 506,700,000	Rp 253,350,000	Rp 253,350,000
85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp 648,036,000	Rp 324,018,000	Rp 324,018,000
86	BATU MANDI	KASAI	Rp 623,731,000	Rp 311,865,500	Rp 311,865,500
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp 542,816,000	Rp 271,408,000	Rp 271,408,000
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp 976,671,000	Rp 488,335,500	Rp 488,335,500
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp 657,286,000	Rp 328,643,000	Rp 328,643,000
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp 576,306,000	Rp 288,153,000	Rp 288,153,000
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp 581,470,000	Rp 290,735,000	Rp 290,735,000
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp 583,168,000	Rp 291,584,000	Rp 291,584,000
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp 537,050,000	Rp 268,525,000	Rp 268,525,000
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp 551,482,000	Rp 275,741,000	Rp 275,741,000
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp 498,664,000	Rp 249,332,000	Rp 249,332,000
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp 504,518,000	Rp 252,259,000	Rp 252,259,000
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp 624,461,000	Rp 312,230,500	Rp 312,230,500
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp 536,694,000	Rp 268,347,000	Rp 268,347,000
99	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp 511,879,000	Rp 255,939,500	Rp 255,939,500
100	LAMPIHONG	KUPANG	Rp 511,167,000	Rp 255,583,500	Rp 255,583,500
101	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp 485,263,000	Rp 242,631,500	Rp 242,631,500
102	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp 475,562,000	Rp 237,781,000	Rp 237,781,000
103	LAMPIHONG	LOK PANGINANAN	Rp 529,335,000	Rp 264,667,500	Rp 264,667,500
104	LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp 507,211,000	Rp 253,605,500	Rp 253,605,500
105	LAMPIHONG	SUNGAI TABUK	Rp 529,394,000	Rp 264,697,000	Rp 264,697,000
106	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp 522,526,000	Rp 261,263,000	Rp 261,263,000
107	LAMPIHONG	PIMPING	Rp 506,497,000	Rp 253,248,500	Rp 253,248,500
108	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp 532,937,000	Rp 266,468,500	Rp 266,468,500
109	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp 468,190,000	Rp 234,095,000	Rp 234,095,000
110	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp 755,717,000	Rp 377,858,500	Rp 377,858,500
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp 466,763,000	Rp 233,381,500	Rp 233,381,500
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp 517,964,000	Rp 258,982,000	Rp 258,982,000
113	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp 705,035,000	Rp 352,517,500	Rp 352,517,500
114	PARINGIN	BALANG	Rp 467,062,000	Rp 233,531,000	Rp 233,531,000
115	PARINGIN	KALAHANG	Rp 606,408,000	Rp 303,204,000	Rp 303,204,000
116	PARINGIN	LASUNG BATU	Rp 528,287,000	Rp 264,143,500	Rp 264,143,500
117	PARINGIN	PARAN	Rp 478,979,000	Rp 239,489,500	Rp 239,489,500
118	PARINGIN	LAYAP	Rp 539,983,000	Rp 269,991,500	Rp 269,991,500
119	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp 541,469,000	Rp 270,734,500	Rp 270,734,500
120	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp 483,702,000	Rp 241,851,000	Rp 241,851,000
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp 505,871,000	Rp 252,935,500	Rp 252,935,500
122	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp 484,798,000	Rp 242,399,000	Rp 242,399,000
123	PARINGIN	DAHAI	Rp 504,698,000	Rp 252,349,000	Rp 252,349,000
124	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp 596,202,000	Rp 298,101,000	Rp 298,101,000
125	PARINGIN	BABAYAU	Rp 519,150,000	Rp 259,575,000	Rp 259,575,000
126	PARINGIN	BALIDA	Rp 497,959,000	Rp 248,979,500	Rp 248,979,500
127	PARINGIN	SUNGAI KETAPI	Rp 634,828,000	Rp 317,414,000	Rp 317,414,000
128	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU LUAR	Rp 490,940,000	Rp 245,470,000	Rp 245,470,000
129	PARINGIN SELATAN	INAN	Rp 483,831,000	Rp 241,915,500	Rp 241,915,500
130	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Rp 532,402,000	Rp 266,201,000	Rp 266,201,000
131	PARINGIN SELATAN	PANGGUNG	Rp 500,178,000	Rp 250,089,000	Rp 250,089,000
132	PARINGIN SELATAN	GALUMBANG	Rp 597,447,000	Rp 298,723,500	Rp 298,723,500
133	PARINGIN SELATAN	HALUBAU	Rp 787,567,000	Rp 393,783,500	Rp 393,783,500
134	PARINGIN SELATAN	BINJAI	Rp 568,774,000	Rp 284,387,000	Rp 284,387,000
135	PARINGIN SELATAN	MURUNG ABUIN	Rp 482,576,000	Rp 241,288,000	Rp 241,288,000
136	PARINGIN SELATAN	BUNGIN	Rp 517,645,000	Rp 258,822,500	Rp 258,822,500
137	PARINGIN SELATAN	MARADAP	Rp 501,463,000	Rp 250,731,500	Rp 250,731,500
138	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp 547,503,000	Rp 273,751,500	Rp 273,751,500
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp 487,925,000	Rp 243,962,500	Rp 243,962,500
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp 481,759,000	Rp 240,879,500	Rp 240,879,500
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp 524,687,000	Rp 262,343,500	Rp 262,343,500
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp 479,937,000	Rp 239,968,500	Rp 239,968,500
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp 653,600,000	Rp 326,800,000	Rp 326,800,000
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp 700,678,000	Rp 350,339,000	Rp 350,339,000
145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp 701,073,000	Rp 350,536,500	Rp 350,536,500
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp 669,087,000	Rp 334,543,500	Rp 334,543,500
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp 649,657,000	Rp 324,828,500	Rp 324,828,500
148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp 635,133,000	Rp 317,566,500	Rp 317,566,500
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp 771,948,000	Rp 385,974,000	Rp 385,974,000
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp 586,389,000	Rp 293,194,500	Rp 293,194,500
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp 580,157,000	Rp 290,078,500	Rp 290,078,500
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp 745,252,000	Rp 372,626,000	Rp 372,626,000
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp 824,008,000	Rp 412,004,000	Rp 412,004,000
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp 551,202,000	Rp 275,601,000	Rp 275,601,000
JUMLAH			Rp 88,789,792,000	Rp 44,394,896,000	Rp 44,394,896,000

B. BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH BAGI SETIAP DESA

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	TAHAP I	TAHAP II
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp 5,548,000	Rp 2,774,000	Rp 2,774,000
2	JUAI	HAMARUNG	Rp 5,377,000	Rp 2,688,500	Rp 2,688,500
3	JUAI	JUAI	Rp 5,422,000	Rp 2,711,000	Rp 2,711,000
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp 5,972,000	Rp 2,986,000	Rp 2,986,000
5	JUAI	BATA	Rp 4,576,000	Rp 2,288,000	Rp 2,288,000
6	JUAI	GALUMBANG	Rp 5,503,000	Rp 2,751,500	Rp 2,751,500
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp 4,852,000	Rp 2,426,000	Rp 2,426,000
8	JUAI	SIRAP	Rp 5,306,000	Rp 2,653,000	Rp 2,653,000
9	JUAI	TIGARUN	Rp 4,563,000	Rp 2,281,500	Rp 2,281,500
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp 5,296,000	Rp 2,648,000	Rp 2,648,000
11	JUAI	PAMURUS	Rp 4,273,000	Rp 2,136,500	Rp 2,136,500
12	JUAI	MARIAS	Rp 4,750,000	Rp 2,375,000	Rp 2,375,000
13	JUAI	LALAYAU	Rp 6,509,000	Rp 3,254,500	Rp 3,254,500
14	JUAI	MIHU	Rp 5,770,000	Rp 2,885,000	Rp 2,885,000
15	JUAI	HUKAI	Rp 4,879,000	Rp 2,439,500	Rp 2,439,500
16	JUAI	TAWAHAN	Rp 5,589,000	Rp 2,794,500	Rp 2,794,500
17	JUAI	GULINGGANG	Rp 4,633,000	Rp 2,316,500	Rp 2,316,500
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp 5,049,000	Rp 2,524,500	Rp 2,524,500
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp 3,847,000	Rp 1,923,500	Rp 1,923,500
20	JUAI	WONOREJO	Rp 4,822,000	Rp 2,411,000	Rp 2,411,000
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp 6,493,000	Rp 3,246,500	Rp 3,246,500
22	HALONG	HAUWAI	Rp 8,453,000	Rp 4,226,500	Rp 4,226,500
23	HALONG	BANGKAL	Rp 4,814,000	Rp 2,407,000	Rp 2,407,000
24	HALONG	MANTUYAN	Rp 6,091,000	Rp 3,045,500	Rp 3,045,500
25	HALONG	TABUAN	Rp 5,156,000	Rp 2,578,000	Rp 2,578,000
26	HALONG	HALONG	Rp 7,298,000	Rp 3,649,000	Rp 3,649,000
27	HALONG	PUYUN	Rp 4,640,000	Rp 2,320,000	Rp 2,320,000
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp 4,656,000	Rp 2,328,000	Rp 2,328,000
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp 5,439,000	Rp 2,719,500	Rp 2,719,500
30	HALONG	KAPUL	Rp 5,539,000	Rp 2,769,500	Rp 2,769,500
31	HALONG	MAMANTANG	Rp 7,271,000	Rp 3,635,500	Rp 3,635,500
32	HALONG	BINJAI PUNGAL	Rp 6,481,000	Rp 3,240,500	Rp 3,240,500
33	HALONG	LIYU	Rp 4,862,000	Rp 2,431,000	Rp 2,431,000
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp 7,357,000	Rp 3,678,500	Rp 3,678,500
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp 7,432,000	Rp 3,716,000	Rp 3,716,000
36	HALONG	BINJU	Rp 4,576,000	Rp 2,288,000	Rp 2,288,000
37	HALONG	KARYA	Rp 5,013,000	Rp 2,506,500	Rp 2,506,500
38	HALONG	UREN	Rp 5,808,000	Rp 2,904,000	Rp 2,904,000
39	HALONG	MARAJAI	Rp 7,223,000	Rp 3,611,500	Rp 3,611,500
40	HALONG	SURYATAMA	Rp 4,469,000	Rp 2,234,500	Rp 2,234,500
41	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp 4,970,000	Rp 2,485,000	Rp 2,485,000
42	HALONG	MAUYA	Rp 5,255,000	Rp 2,627,500	Rp 2,627,500
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp 5,293,000	Rp 2,646,500	Rp 2,646,500
44	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp 4,340,000	Rp 2,170,000	Rp 2,170,000
45	HALONG	MAMIGANG	Rp 6,392,000	Rp 3,196,000	Rp 3,196,000
46	AWAYAN	BIHARA	Rp 3,767,000	Rp 1,883,500	Rp 1,883,500
47	AWAYAN	PEMATANG	Rp 3,977,000	Rp 1,988,500	Rp 1,988,500
48	AWAYAN	MERAH	Rp 3,912,000	Rp 1,956,000	Rp 1,956,000
49	AWAYAN	AWAYAN	Rp 3,678,000	Rp 1,839,000	Rp 1,839,000
50	AWAYAN	PUDAK	Rp 3,830,000	Rp 1,915,000	Rp 1,915,000
51	AWAYAN	BADALUNGA	Rp 4,707,000	Rp 2,353,500	Rp 2,353,500
52	AWAYAN	TUNDAKAN	Rp 4,591,000	Rp 2,295,500	Rp 2,295,500
53	AWAYAN	SIKONTAN	Rp 4,036,000	Rp 2,018,000	Rp 2,018,000
54	AWAYAN	PULANTAN	Rp 3,749,000	Rp 1,874,500	Rp 1,874,500
55	AWAYAN	TUNDI	Rp 4,345,000	Rp 2,172,500	Rp 2,172,500
56	AWAYAN	MUARA JAYA	Rp 4,106,000	Rp 2,053,000	Rp 2,053,000
57	AWAYAN	BIHARA HILIR	Rp 4,217,000	Rp 2,108,500	Rp 2,108,500
58	AWAYAN	BARU	Rp 4,139,000	Rp 2,069,500	Rp 2,069,500
59	AWAYAN	AWAYAN HILIR	Rp 3,622,000	Rp 1,811,000	Rp 1,811,000
60	AWAYAN	PUTAT BASIUN	Rp 4,392,000	Rp 2,196,000	Rp 2,196,000
61	AWAYAN	SEI PUMPUNG	Rp 4,081,000	Rp 2,040,500	Rp 2,040,500
62	AWAYAN	BADALUNGA HILIR	Rp 3,662,000	Rp 1,831,000	Rp 1,831,000
63	AWAYAN	NUNGKA	Rp 4,328,000	Rp 2,164,000	Rp 2,164,000
64	AWAYAN	TANGALIN	Rp 4,409,000	Rp 2,204,500	Rp 2,204,500
65	AWAYAN	KEDONDONG	Rp 3,746,000	Rp 1,873,000	Rp 1,873,000
66	AWAYAN	BARAMBAN	Rp 4,023,000	Rp 2,011,500	Rp 2,011,500
67	AWAYAN	AMBAKIANG	Rp 4,595,000	Rp 2,297,500	Rp 2,297,500
68	AWAYAN	PIYAIT	Rp 4,335,000	Rp 2,167,500	Rp 2,167,500

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	TAHAP I	TAHAP II
69	BATU MANDI	TARIWIN	Rp 4,176,000	Rp 2,088,000	Rp 2,088,000
70	BATU MANDI	LOK BATU	Rp 4,422,000	Rp 2,211,000	Rp 2,211,000
71	BATU MANDI	MUNJUNG	Rp 4,903,000	Rp 2,451,500	Rp 2,451,500
72	BATU MANDI	PELAJAU	Rp 4,710,000	Rp 2,355,000	Rp 2,355,000
73	BATU MANDI	BATUMANDI	Rp 6,135,000	Rp 3,067,500	Rp 3,067,500
74	BATU MANDI	RIWA	Rp 5,618,000	Rp 2,809,000	Rp 2,809,000
75	BATU MANDI	MANTIMIN	Rp 5,433,000	Rp 2,716,500	Rp 2,716,500
76	BATU MANDI	MAMPARI	Rp 6,860,000	Rp 3,430,000	Rp 3,430,000
77	BATU MANDI	BUNGUR	Rp 4,380,000	Rp 2,190,000	Rp 2,190,000
78	BATU MANDI	TELUK MESJID	Rp 5,092,000	Rp 2,546,000	Rp 2,546,000
79	BATU MANDI	TIMBUN TULANG	Rp 4,441,000	Rp 2,220,500	Rp 2,220,500
80	BATU MANDI	BANUA HANYAR	Rp 5,153,000	Rp 2,576,500	Rp 2,576,500
81	BATU MANDI	BAKUNG	Rp 4,237,000	Rp 2,118,500	Rp 2,118,500
82	BATU MANDI	KARUH	Rp 4,804,000	Rp 2,402,000	Rp 2,402,000
83	BATU MANDI	GUHA	Rp 4,465,000	Rp 2,232,500	Rp 2,232,500
84	BATU MANDI	GUNUNG MANAU	Rp 4,682,000	Rp 2,341,000	Rp 2,341,000
85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp 4,593,000	Rp 2,296,500	Rp 2,296,500
86	BATU MANDI	KASAI	Rp 3,795,000	Rp 1,897,500	Rp 1,897,500
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp 3,622,000	Rp 1,811,000	Rp 1,811,000
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp 4,284,000	Rp 2,142,000	Rp 2,142,000
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp 4,169,000	Rp 2,084,500	Rp 2,084,500
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp 5,244,000	Rp 2,622,000	Rp 2,622,000
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp 4,215,000	Rp 2,107,500	Rp 2,107,500
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp 4,367,000	Rp 2,183,500	Rp 2,183,500
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp 3,728,000	Rp 1,864,000	Rp 1,864,000
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp 4,375,000	Rp 2,187,500	Rp 2,187,500
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp 4,066,000	Rp 2,033,000	Rp 2,033,000
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp 4,238,000	Rp 2,119,000	Rp 2,119,000
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp 4,115,000	Rp 2,057,500	Rp 2,057,500
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp 4,322,000	Rp 2,161,000	Rp 2,161,000
99	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp 3,939,000	Rp 1,969,500	Rp 1,969,500
100	LAMPIHONG	KUPANG	Rp 3,860,000	Rp 1,930,000	Rp 1,930,000
101	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp 4,039,000	Rp 2,019,500	Rp 2,019,500
102	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp 3,975,000	Rp 1,987,500	Rp 1,987,500
103	LAMPIHONG	LOK PANGINANAN	Rp 4,366,000	Rp 2,183,000	Rp 2,183,000
104	LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp 4,119,000	Rp 2,059,500	Rp 2,059,500
105	LAMPIHONG	SUNGAI TABUK	Rp 3,445,000	Rp 1,722,500	Rp 1,722,500
106	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp 3,690,000	Rp 1,845,000	Rp 1,845,000
107	LAMPIHONG	PIMPING	Rp 3,568,000	Rp 1,784,000	Rp 1,784,000
108	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp 3,675,000	Rp 1,837,500	Rp 1,837,500
109	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp 3,855,000	Rp 1,927,500	Rp 1,927,500
110	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp 4,034,000	Rp 2,017,000	Rp 2,017,000
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp 3,754,000	Rp 1,877,000	Rp 1,877,000
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp 4,667,000	Rp 2,333,500	Rp 2,333,500
113	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp 4,167,000	Rp 2,083,500	Rp 2,083,500
114	PARINGIN	BALANG	Rp 3,566,000	Rp 1,783,000	Rp 1,783,000
115	PARINGIN	KALAHANG	Rp 4,032,000	Rp 2,016,000	Rp 2,016,000
116	PARINGIN	LASUNG BATU	Rp 5,395,000	Rp 2,697,500	Rp 2,697,500
117	PARINGIN	PARAN	Rp 3,678,000	Rp 1,839,000	Rp 1,839,000
118	PARINGIN	LAYAP	Rp 3,952,000	Rp 1,976,000	Rp 1,976,000
119	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp 4,174,000	Rp 2,087,000	Rp 2,087,000
120	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp 3,789,000	Rp 1,894,500	Rp 1,894,500
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp 4,797,000	Rp 2,398,500	Rp 2,398,500
122	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp 3,906,000	Rp 1,953,000	Rp 1,953,000
123	PARINGIN	DAHAI	Rp 4,915,000	Rp 2,457,500	Rp 2,457,500
124	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp 4,400,000	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
125	PARINGIN	BABAYAU	Rp 4,030,000	Rp 2,015,000	Rp 2,015,000
126	PARINGIN	BALIDA	Rp 4,344,000	Rp 2,172,000	Rp 2,172,000
127	PARINGIN	SUNGAI KETAPI	Rp 4,448,000	Rp 2,224,000	Rp 2,224,000
128	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU LUAR	Rp 3,805,000	Rp 1,902,500	Rp 1,902,500
129	PARINGIN SELATAN	INAN	Rp 4,074,000	Rp 2,037,000	Rp 2,037,000
130	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Rp 4,308,000	Rp 2,154,000	Rp 2,154,000
131	PARINGIN SELATAN	PANGGUNG	Rp 3,906,000	Rp 1,953,000	Rp 1,953,000
132	PARINGIN SELATAN	GALUMBANG	Rp 4,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
133	PARINGIN SELATAN	HALUBAU	Rp 4,028,000	Rp 2,014,000	Rp 2,014,000
134	PARINGIN SELATAN	BINJAI	Rp 3,895,000	Rp 1,947,500	Rp 1,947,500
135	PARINGIN SELATAN	MURUNG ABUIN	Rp 4,031,000	Rp 2,015,500	Rp 2,015,500

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	TAHAP I	TAHAP II
136	PARINGIN SELATAN	BUNGIN	Rp 4,498,000	Rp 2,249,000	Rp 2,249,000
137	PARINGIN SELATAN	MARADAP	Rp 3,953,000	Rp 1,976,500	Rp 1,976,500
138	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp 3,561,000	Rp 1,780,500	Rp 1,780,500
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp 3,559,000	Rp 1,779,500	Rp 1,779,500
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp 3,969,000	Rp 1,984,500	Rp 1,984,500
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp 4,108,000	Rp 2,054,000	Rp 2,054,000
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp 3,390,000	Rp 1,695,000	Rp 1,695,000
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp 8,263,000	Rp 4,131,500	Rp 4,131,500
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp 4,384,000	Rp 2,192,000	Rp 2,192,000
145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp 5,376,000	Rp 2,688,000	Rp 2,688,000
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp 5,047,000	Rp 2,523,500	Rp 2,523,500
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp 4,526,000	Rp 2,263,000	Rp 2,263,000
148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp 4,038,000	Rp 2,019,000	Rp 2,019,000
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp 4,717,000	Rp 2,358,500	Rp 2,358,500
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp 4,037,000	Rp 2,018,500	Rp 2,018,500
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp 5,143,000	Rp 2,571,500	Rp 2,571,500
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp 3,868,000	Rp 1,934,000	Rp 1,934,000
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp 7,264,000	Rp 3,632,000	Rp 3,632,000
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp 4,025,000	Rp 2,012,500	Rp 2,012,500
JUMLAH			Rp 719,100,000	Rp 359,550,000	Rp 359,550,000

C. BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	TAHAP I	TAHAP II
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp 1,324,000	Rp 662,000	Rp 662,000
2	JUAI	HAMARUNG	Rp 1,284,000	Rp 642,000	Rp 642,000
3	JUAI	JUAI	Rp 1,294,000	Rp 647,000	Rp 647,000
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp 1,426,000	Rp 713,000	Rp 713,000
5	JUAI	BATA	Rp 1,092,000	Rp 546,000	Rp 546,000
6	JUAI	GALUMBANG	Rp 1,314,000	Rp 657,000	Rp 657,000
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp 1,158,000	Rp 579,000	Rp 579,000
8	JUAI	SIRAP	Rp 1,267,000	Rp 633,500	Rp 633,500
9	JUAI	TIGARUN	Rp 1,089,000	Rp 544,500	Rp 544,500
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp 1,264,000	Rp 632,000	Rp 632,000
11	JUAI	PAMURUS	Rp 1,020,000	Rp 510,000	Rp 510,000
12	JUAI	MARIAS	Rp 1,134,000	Rp 567,000	Rp 567,000
13	JUAI	LALAYAU	Rp 1,554,000	Rp 777,000	Rp 777,000
14	JUAI	MIHU	Rp 1,377,000	Rp 688,500	Rp 688,500
15	JUAI	HUKAI	Rp 1,165,000	Rp 582,500	Rp 582,500
16	JUAI	TAWAHAN	Rp 1,334,000	Rp 667,000	Rp 667,000
17	JUAI	GULINGGANG	Rp 1,106,000	Rp 553,000	Rp 553,000
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp 1,205,000	Rp 602,500	Rp 602,500
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp 918,000	Rp 459,000	Rp 459,000
20	JUAI	WONOREJO	Rp 1,151,000	Rp 575,500	Rp 575,500
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp 1,550,000	Rp 775,000	Rp 775,000
22	HALONG	HAUWAI	Rp 2,018,000	Rp 1,009,000	Rp 1,009,000
23	HALONG	BANGKAL	Rp 1,149,000	Rp 574,500	Rp 574,500
24	HALONG	MANTUYAN	Rp 1,454,000	Rp 727,000	Rp 727,000
25	HALONG	TABUAN	Rp 1,231,000	Rp 615,500	Rp 615,500
26	HALONG	HALONG	Rp 1,742,000	Rp 871,000	Rp 871,000
27	HALONG	PUYUN	Rp 1,108,000	Rp 554,000	Rp 554,000
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp 1,112,000	Rp 556,000	Rp 556,000
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp 1,298,000	Rp 649,000	Rp 649,000
30	HALONG	KAPUL	Rp 1,322,000	Rp 661,000	Rp 661,000
31	HALONG	MAMANTANG	Rp 1,736,000	Rp 868,000	Rp 868,000
32	HALONG	BINJAI PUNGAL	Rp 1,547,000	Rp 773,500	Rp 773,500
33	HALONG	LIYU	Rp 1,161,000	Rp 580,500	Rp 580,500
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp 1,756,000	Rp 878,000	Rp 878,000
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp 1,774,000	Rp 887,000	Rp 887,000
36	HALONG	BINJU	Rp 1,092,000	Rp 546,000	Rp 546,000
37	HALONG	KARYA	Rp 1,197,000	Rp 598,500	Rp 598,500
38	HALONG	UREN	Rp 1,387,000	Rp 693,500	Rp 693,500
39	HALONG	MARAJAI	Rp 1,724,000	Rp 862,000	Rp 862,000
40	HALONG	SURYATAMA	Rp 1,067,000	Rp 533,500	Rp 533,500
41	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp 1,186,000	Rp 593,000	Rp 593,000
42	HALONG	MAUYA	Rp 1,254,000	Rp 627,000	Rp 627,000
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp 1,263,000	Rp 631,500	Rp 631,500
44	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp 1,036,000	Rp 518,000	Rp 518,000
45	HALONG	MAMIGANG	Rp 1,526,000	Rp 763,000	Rp 763,000
46	AWAYAN	BIHARA	Rp 899,000	Rp 449,500	Rp 449,500
47	AWAYAN	PEMATANG	Rp 949,000	Rp 474,500	Rp 474,500
48	AWAYAN	MERAH	Rp 934,000	Rp 467,000	Rp 467,000
49	AWAYAN	AWAYAN	Rp 878,000	Rp 439,000	Rp 439,000
50	AWAYAN	PUDAK	Rp 914,000	Rp 457,000	Rp 457,000
51	AWAYAN	BADALUNGA	Rp 1,124,000	Rp 562,000	Rp 562,000
52	AWAYAN	TUNDAKAN	Rp 1,096,000	Rp 548,000	Rp 548,000
53	AWAYAN	SIKONTAN	Rp 964,000	Rp 482,000	Rp 482,000
54	AWAYAN	PULANTAN	Rp 895,000	Rp 447,500	Rp 447,500
55	AWAYAN	TUNDI	Rp 1,037,000	Rp 518,500	Rp 518,500
56	AWAYAN	MUARA JAYA	Rp 980,000	Rp 490,000	Rp 490,000
57	AWAYAN	BIHARA HILIR	Rp 1,007,000	Rp 503,500	Rp 503,500
58	AWAYAN	BARU	Rp 988,000	Rp 494,000	Rp 494,000
59	AWAYAN	AWAYAN HILIR	Rp 865,000	Rp 432,500	Rp 432,500
60	AWAYAN	PUTAT BASIUN	Rp 1,048,000	Rp 524,000	Rp 524,000
61	AWAYAN	SEI PUMPUNG	Rp 974,000	Rp 487,000	Rp 487,000
62	AWAYAN	BADALUNGA HILIR	Rp 874,000	Rp 437,000	Rp 437,000
63	AWAYAN	NUNGKA	Rp 1,033,000	Rp 516,500	Rp 516,500
64	AWAYAN	TANGALIN	Rp 1,052,000	Rp 526,000	Rp 526,000
65	AWAYAN	KEDONDONG	Rp 894,000	Rp 447,000	Rp 447,000
66	AWAYAN	BARAMBAN	Rp 960,000	Rp 480,000	Rp 480,000
67	AWAYAN	AMBAKIANG	Rp 1,097,000	Rp 548,500	Rp 548,500
68	AWAYAN	PIYAIT	Rp 1,035,000	Rp 517,500	Rp 517,500
69	BATU MANDI	TARIWIN	Rp 997,000	Rp 498,500	Rp 498,500

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	TAHAP I	TAHAP II
70	BATU MANDI	LOK BATU	Rp 1,056,000	Rp 528,000	Rp 528,000
71	BATU MANDI	MUNJUNG	Rp 1,171,000	Rp 585,500	Rp 585,500
72	BATU MANDI	PELAJAU	Rp 1,124,000	Rp 562,000	Rp 562,000
73	BATU MANDI	BATUMANDI	Rp 1,465,000	Rp 732,500	Rp 732,500
74	BATU MANDI	RIWA	Rp 1,341,000	Rp 670,500	Rp 670,500
75	BATU MANDI	MANTIMIN	Rp 1,297,000	Rp 648,500	Rp 648,500
76	BATU MANDI	MAMPARI	Rp 1,638,000	Rp 819,000	Rp 819,000
77	BATU MANDI	BUNGUR	Rp 1,046,000	Rp 523,000	Rp 523,000
78	BATU MANDI	TELUK MESJID	Rp 1,216,000	Rp 608,000	Rp 608,000
79	BATU MANDI	TIMBUN TULANG	Rp 1,060,000	Rp 530,000	Rp 530,000
80	BATU MANDI	BANUA HANYAR	Rp 1,230,000	Rp 615,000	Rp 615,000
81	BATU MANDI	BAKUNG	Rp 1,012,000	Rp 506,000	Rp 506,000
82	BATU MANDI	KARUH	Rp 1,147,000	Rp 573,500	Rp 573,500
83	BATU MANDI	GUHA	Rp 1,066,000	Rp 533,000	Rp 533,000
84	BATU MANDI	GUNUNG MANAU	Rp 1,118,000	Rp 559,000	Rp 559,000
85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp 1,096,900	Rp 548,450	Rp 548,450
86	BATU MANDI	KASAI	Rp 906,000	Rp 453,000	Rp 453,000
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp 865,000	Rp 432,500	Rp 432,500
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp 1,023,000	Rp 511,500	Rp 511,500
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp 995,000	Rp 497,500	Rp 497,500
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp 1,252,000	Rp 626,000	Rp 626,000
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp 1,006,000	Rp 503,000	Rp 503,000
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp 1,042,000	Rp 521,000	Rp 521,000
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp 890,000	Rp 445,000	Rp 445,000
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp 1,044,000	Rp 522,000	Rp 522,000
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp 971,000	Rp 485,500	Rp 485,500
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp 1,012,000	Rp 506,000	Rp 506,000
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp 982,000	Rp 491,000	Rp 491,000
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp 1,032,000	Rp 516,000	Rp 516,000
99	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp 940,000	Rp 470,000	Rp 470,000
100	LAMPIHONG	KUPANG	Rp 921,000	Rp 460,500	Rp 460,500
101	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp 964,000	Rp 482,000	Rp 482,000
102	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp 949,000	Rp 474,500	Rp 474,500
103	LAMPIHONG	LOK PANGINANAN	Rp 1,042,000	Rp 521,000	Rp 521,000
104	LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp 983,000	Rp 491,500	Rp 491,500
105	LAMPIHONG	SUNGAI TABUK	Rp 822,000	Rp 411,000	Rp 411,000
106	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp 881,000	Rp 440,500	Rp 440,500
107	LAMPIHONG	PIMPING	Rp 852,000	Rp 426,000	Rp 426,000
108	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp 877,000	Rp 438,500	Rp 438,500
109	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp 920,000	Rp 460,000	Rp 460,000
110	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp 963,000	Rp 481,500	Rp 481,500
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp 896,000	Rp 448,000	Rp 448,000
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp 1,114,000	Rp 557,000	Rp 557,000
113	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp 995,000	Rp 497,500	Rp 497,500
114	PARINGIN	BALANG	Rp 851,000	Rp 425,500	Rp 425,500
115	PARINGIN	KALAHANG	Rp 963,000	Rp 481,500	Rp 481,500
116	PARINGIN	LASUNG BATU	Rp 1,288,000	Rp 644,000	Rp 644,000
117	PARINGIN	PARAN	Rp 878,000	Rp 439,000	Rp 439,000
118	PARINGIN	LAYAP	Rp 943,000	Rp 471,500	Rp 471,500
119	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp 997,000	Rp 498,500	Rp 498,500
120	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp 905,000	Rp 452,500	Rp 452,500
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp 1,145,000	Rp 572,500	Rp 572,500
122	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp 932,000	Rp 466,000	Rp 466,000
123	PARINGIN	DAHAI	Rp 1,173,000	Rp 586,500	Rp 586,500
124	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp 1,050,000	Rp 525,000	Rp 525,000
125	PARINGIN	BABAYAU	Rp 962,000	Rp 481,000	Rp 481,000
126	PARINGIN	BALIDA	Rp 1,037,000	Rp 518,500	Rp 518,500
127	PARINGIN	SUNGAI KETAPI	Rp 1,062,000	Rp 531,000	Rp 531,000
128	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU LUAR	Rp 908,000	Rp 454,000	Rp 454,000
129	PARINGIN SELATAN	INAN	Rp 972,000	Rp 486,000	Rp 486,000
130	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Rp 1,028,000	Rp 514,000	Rp 514,000
131	PARINGIN SELATAN	PANGGUNG	Rp 933,000	Rp 466,500	Rp 466,500
132	PARINGIN SELATAN	GALUMBANG	Rp 955,000	Rp 477,500	Rp 477,500
133	PARINGIN SELATAN	HALUBAU	Rp 962,000	Rp 481,000	Rp 481,000
134	PARINGIN SELATAN	BINJAI	Rp 930,000	Rp 465,000	Rp 465,000
135	PARINGIN SELATAN	MURUNG ABUIN	Rp 962,000	Rp 481,000	Rp 481,000
136	PARINGIN SELATAN	BUNGIN	Rp 1,074,000	Rp 537,000	Rp 537,000
137	PARINGIN SELATAN	MARADAP	Rp 944,000	Rp 472,000	Rp 472,000

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	TAHAP I	TAHAP II
138	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp 850.000	Rp 425.000	Rp 425.000
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp 850.000	Rp 425.000	Rp 425.000
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp 947.000	Rp 473.500	Rp 473.500
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp 981.000	Rp 490.500	Rp 490.500
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp 809.000	Rp 404.500	Rp 404.500
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp 1.972.000	Rp 986.000	Rp 986.000
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp 1.047.000	Rp 523.500	Rp 523.500
145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp 1.283.000	Rp 641.500	Rp 641.500
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp 1.205.000	Rp 602.500	Rp 602.500
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp 1.080.000	Rp 540.000	Rp 540.000
148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp 964.000	Rp 482.000	Rp 482.000
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp 1.126.000	Rp 563.000	Rp 563.000
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp 964.000	Rp 482.000	Rp 482.000
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp 1.228.000	Rp 614.000	Rp 614.000
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp 923.000	Rp 461.500	Rp 461.500
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp 1.734.000	Rp 867.000	Rp 867.000
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp 961.000	Rp 480.500	Rp 480.500
JUMLAH			Rp 171.660.900	Rp 85.830.450	Rp 85.830.450

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN